

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. Partisipasi Masyarakat

##### a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Indonesia merupakan negara berkembang yang sekarang ini tengah melaksanakan program pembangunan intensif di beberapa bidang. Pembangunan merupakan peralihan dari satu situasi nasional ke situasi nasional lainnya yang dianggap unggul. Sementara itu, tujuan pembangunan yakni guna melakukan peningkatan pada kualitas hidup manusia lewat beberapa aspek kehidupan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pembangunan, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Sebab bagaimana juga, masyarakat merupakan faktor paling penting dalam pembangunan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berpengaruh besar pada pengembangan kesejahteraan warga.

Partisipasi merupakan keterlibatan individu pada tindakan tertentu. Sesuai pemaparan Bornby, partisipasi merupakan tindakan keikutsertaan, khususnya suatu kegiatan atau pernyataan keikutsertaan dalam suatu aktivitas bertujuan guna mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Berlandaskan penguraian Verhangen, partisipasi adalah bentuk interaksi dan komunikasi khusus yang melibatkan alokasi wewenang, tanggung jawab, dan manfaat.<sup>15</sup> Sesuai pemaparan Ach. Wazir, partisipasi didefinisikan dengan keikutsertaan individu didalam hubungan sosial pada suatu kondisi. Adanya definisi tersebut, individu bisa terlibat jika mereka menemukan dirinya di dalam sebuah kelompok, lewat berbagai proses dengan individu lainnya berdasarkan hal tradisi, nilai, budaya, kepatuhan, perasaan, kesetiaan dan tanggungjawab bersama.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu ataupun kelompok sosial dan organisasi pada aktivitas

---

<sup>14</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Aqli, 2018), 6-9

<sup>15</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 81

<sup>16</sup>Ach. Wazir, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, 1999), 29

tertentu bersama saling merencanakan, memahami, menganalisa, melaksanakan tindakan.

Sedangkan definisi masyarakat sendiri, masyarakat berdasar akar kata asalnya dari bahasa Arab “*musyararak*”, menurut bahasa Inggris disebut dengan *society*, yang asalnya dari bahasa latin “*societas*” merupakan hubungan persahabatan antara satu dengan lainnya. Maka masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang berada dalam sistem tertentu, baik tertutup dan terbuka serta di dalamnya juga terjai interaksi dengan anggotanya sehingga menyebabkan ketergantungan dari satu dengan lainnya.<sup>17</sup>

Sesuai pemaparan Selo Soemardjan, masyarakat adalah seseorang yang tinggal bersama atau menciptakan kebudayaan. Emile Durkheim menjelaskan masyarakat merupakan realitas obyektif dari setiap individu yang menjadi anggotanya. Kehidupan suatu masyarakat adalah salah satu sistem sosial yang setiap bagiannya saling terkait maupun menciptakan satu kesatuan utuh.

Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Berkumpul dengan waktu cukup lama
- 2) Sistem bersama yang menciptakan kebudayaan merupakan bentuk akibat dari perasaan yang saling berhubungan
- 3) Menyadari bahwa kehidupan adalah satu kesatuan
- 4) Manusia yang tinggal bersama-sama kurang mencakup dua orang.<sup>18</sup>

Menurut Conyers menjelaskan bahwa dalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa hal utama diantaranya sebagai berikut.

- 1) Partisipasi merupakan alat guna mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, sikap, keadaan warga lokal, dan jika tidak ada kehadiran mereka maka proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat lebih percaya terhadap sebuah program ataupun rencana bila mereka merasa terlibat langsung pada proses perencanaan dan persiapannya, sebab

---

<sup>17</sup>Indriana F, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 6

<sup>18</sup>Bambang Tejokusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”, *Jurnal Geoedukasi* 3 No. 1 (2014), 39, diakses pada 02 November, 2023, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>.

mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang detail program dan akan merasakan kepemilikan program.

- 3) Partisipasi masyarakat adalah hak demokratis jika masyarakat terlibat langsung dalam suatu program.<sup>19</sup>

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau kontribusi dimana individu ataupun kelompok berperan dalam aktivitas atau suatu program. Sesuai pemaparan Adisasmita mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan memberdayakan masyarakat dengan cara terlibat didalam aktivitas pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan proyek atau sebagai wujud kesiapan atau kesanggupan masyarakat guna berkorban dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.<sup>20</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Partisipasi

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh DFID, beberapa prinsip partisipasi mencakup:<sup>21</sup>

- 1) Cakupan. Seluruh individu ataupun perwakilan dari setiap kelompok yang terlibat pada proyek pembangunan tertentu.
- 2) Kesetaraan tanggung jawab. Setiap pihak memiliki tanggung jawab pasti pada masing-masing proses sebab dengan terdapatnya keikutsertaan juga kesetaraannya saat mengambil langkah dan keputusan berikutnya.
- 3) Transparansi. Semua pihak mampu mempertimbangkan kualifikasi dan struktur dari setiap pihak.
- 4) Kesetaraan kewenangan. Pemangku kepentingan yang berbeda harus mampu menyesuaikan distribusi kekuasaan dengan wewenang dalam mencegah dominasi.
- 5) Kerjasama. Perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan guna saling berbagi kelebihan untuk meminimalisir kekurangan yang dimiliki, terkhusus berhubungan dengan kapasitas SDM.
- 6) Kesetaraan maupun kemitraan. Semua individu pada dasarnya mempunyai potensi, keterampilan, inisiatif,

---

<sup>19</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 32

<sup>20</sup>Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid, Arik Prasetya, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 33 No. 2 April (2016): 20, diakses pada 19 Oktober, 2023, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1296>.

<sup>21</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 30

juga berhak menggunakan inisiatif tersebut guna berpartisipasi pada semua proses pembangunan dialog dan tidak memperhitungkan struktur serta jenjang setiap pihak.

- 7) Pemberdayaan. Keterlibatan beberapa pihak tidak lepas dari semua kekurangan maupun kelebihan setiap pihak, oleh karena itu lewat keterlibatan aktif pada semua proses operasional akan adanya proses saling memberdayakan juga belajar satu sama lain.<sup>22</sup>

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Yadav menyatakan adanya empat macam aktivitas yang memperlihatkan bentuk partisipasi yaitu:

- 1) Partisipasi dalam mengambil keputusan

Secara umum, dalam program pengembangan masyarakat tetap ditentukan pemerintah, pada beberapa kasus hanya mencerminkan kebutuhan kelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan maupun kurang menggambarkan keperluan juga keinginan masyarakat sebagai suatu kelompok masyarakat yang utuh.

Oleh karenanya, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan pada pembangunan dengan membuka wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan terkait pembangunan lokal maupun tingkatan lokal.<sup>23</sup>

- 2) Partisipasi dalam melaksanakan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering dipahami sebagai bentuk partisipasi banyak orang yang rela memnyalurkan usahanya dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, masyarakat kelas atas dalam banyak hal mendapatkan manfaat lebih dibandingkan hasil pembangunan dan tidak perlu memberikan kontribusi yang sesuai. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus dipahami dalam melakukan pembangunan sebagai kontribusi masyarakat baik dalam bentuk tenaga, uang atau bentuk lainnya yang sesuai dengan manfaat yang didapat oleh setiap anggota masyarakat yang berkepentingan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 30

<sup>23</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 82-83

<sup>24</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 33

Selain itu, dalam proses pembangunan yang sering terlupakan yaitu partisipasi masyarakat dalam menjaga proyek pengembangan masyarakat yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengorganisir masyarakat diperlukan kegiatan khusus guna mempertahankan hasil pembangunan agar dapat menikmati manfaat jangka panjang.<sup>25</sup>

3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangatlah penting. Tidak saja diperlukan pencapaian tujuan yang direncanakan, namun juga diperlukan adanya masukan terhadap permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat guna memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan tindakan aparat pembangunan sangat dibutuhkan.<sup>26</sup>

4) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan

Partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan adalah faktor utama yang seringkali dilupakan. Memang target pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup sebagian besar masyarakat, sehingga kesetaraan hasil pembangunan menjadi tujuan utama. Selain itu, memanfaatkan hasil pembangunan dapat mendorong keinginan dan semangat sukarelawan masyarakat guna tetap berpartisipasi dalam program pembangunan di masa depan.

Namun partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan seringkali kurang memperoleh perhatian dari pemerintah dan pengelola pembangun pada umumnya, yang sering beranggapan bahwa begitu aktualisasi pembangunan selesai, maka manfaatnya secara langsung akan dinikmati oleh masyarakat sasaran. Sementara itu, masyarakat sasaran seringkali tidak paham bahwa manfaat disetiap program pembangunan yang dilakukan hanya sia-sia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 83

<sup>26</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 33

<sup>27</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 84



Sementara itu, jika melibatkan masyarakat atau ingin berpartisipasi dalam pembangunan, itu juga harus memberdayakan mereka. Dinamakan pemberdayaan masyarakat karena dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka dapat merubah juga pola pikir dan menjadikan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Kata “pemberdayaan” berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuatan atau kemampuan dalam melaksanakan sesuatu atau keinginan guna bertindak, sedangkan pemberdayaan berasal dari kata “*empowerment*” yang artinya suatu proses, cara atau tindakan pemberdayaan.<sup>28</sup>

Dusseldorp mengemukakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam, yang dapat berupa:

- 1) Melibatkan diri terhadap suatu kegiatan atau organisasi guna menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya.
- 2) Melibatkan diri terhadap kegiatan diskusi dalam kelompok.
- 3) Menjadi anggota atau tim dari kelompok-kelompok masyarakat.
- 4) Mengaktifkan sumber daya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dari pengambilan keputusan.
- 6) Menggunakan hasil yang telah didapatkan dari suatu kegiatan masyarakat.<sup>29</sup>

d. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat

Menurut Habley mengemukakan bahwa tipe dalam partisipasi di antaranya adalah:

- 1) Partisipasi Pasif atau Manipulatif, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
  - a) Masyarakat mendapat informasi tentang apa yang sedang terjadi atau telah terjadi,
  - b) Menginformasikan sepihak oleh pelaksana kegiatan tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat,
  - c) Pertukaran informasi hanya terbatas pada para ahli di luar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi Informatif, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

---

<sup>28</sup>KBBI Online, diakses pada tanggal 02 November 2023, <https://kbbi.web.id/daya>.

<sup>29</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 84

- a) Masyarakat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti,
  - b) Masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses penelitian,
  - c) Keakuratan hasil pencarian tidak dibicarakan dengan komunitas.<sup>30</sup>
- 3) Partisipasi Konsultatif, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
    - a) Masyarakat dalam berpartisipasi melalui konsultasi,
    - b) Orang lain memperhatikan, menguraian masalah serta pemecahannya,
    - c) Tidak ada kesempatan untuk membentuk keputusan bersama,
    - d) Para professional tidak wajib untuk mengemukakan pandangan,
    - e) Masyarakat (sebagai masukan) guna ditindaklanjuti.
  - 4) Partisipasi Insentif, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
    - a) Masyarakat melakukan pengorbanan atau pelayanan untuk mendapatkan imbalan berupa insentif atau gaji,
    - b) Masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran maupun percobaan yang dilaksanakan,
    - c) Masyarakat tidak tertarik untuk melakukan operasi setelah insentif dihentikan.<sup>31</sup>
  - 5) Partisipasi Fungsional, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
    - a) Masyarakat membuat suatu kelompok guna mencapai tujuan pembangunan,
    - b) Pembuatan kelompok setelah ada keputusan utama yang disetujui,
    - c) Pada tahap pertama, masyarakat bergantung pada pihak lain, namun secara perlahan membuktikan kemandiriannya.
  - 6) Partisipasi Interaktif, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
    - a) Masyarakat bertindak dalam analisis guna merencanakan program dan pembuatan atau penguatan lembaga,

---

<sup>30</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 88-89

<sup>31</sup>Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 34-35

- b) Seringkali mengikutsertakan proses interdisipliner guna menggali keragaman perspektif dalam kegiatan pembelajaran yang sistematis dan tersusun,
  - c) Masyarakat mempunyai peranan guna memantau atas hasil keputusan mereka, sehingga mempunyai kontribusi dalam semua proses kegiatan.<sup>32</sup>
- 7) Self Mobilization (mandiri), mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
- a) Masyarakat bebas mengambil inisiatif (tanpa pengaruh luar) guna memperbarui sistem atau nilai-nilai yang dianut,
  - b) Komunitas mengembangkan hubungan dengan organisasi lain guna memperoleh dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan,
  - c) Masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan/atau pemanfaatan sumber daya yang ada.
- e. Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat
- Dalam partisipasi masyarakat terdapat faktor penghambat, di antaranya.
- 1) Sarana dan prasarana

Sarana prasana pariwisata merupakan unsur yang melengkapi serta memiliki tujuan guna mempermudah proses kegiatan pariwisata yang bisa berjalan lancar. Inovasi sarana prasana adalah cara paling penting untuk sebuah organisasi dalam menumbuhkan nilai untuk konsumen dan mewujudkan keunggulan yang kompetitif, proses inovasi produk akan memberi dampak langsung pada kesuksesan sebuah organisasi yang diperlihatkan dengan peningkatan profit dan revenuennya.<sup>33</sup>

Sarana wisata merupakan perusahaan juga fasilitas yang memberi layanan pada wisatawan baik dengan langsung dan tidak langsung, indikator sarana adalah perusahaan transportasi dan perjalanan. Prasana merupakan seluruh fasilitas umum ataupun dasar yang memberi kemungkinan pada sarana kepariwisataan bisa

---

<sup>32</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 89-90

<sup>33</sup>Yosef Abdul Ghani, "Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat", *Jurnal Pariwisata IV* No. 1 April (2017): 24, diakses pada 23 Januari, 2024, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/download/1798/1341>.



hidup serta berkembang pada upaya memberi layanan pada wisatawan.<sup>34</sup>

## 2) Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah daya penghubung diantara zona yang berupa jaringan angkutan beserta jalan raya. Aksesibilitas adalah faktor krusial pada proses berwisata, tingkatan kemudahan dalam mengakses wilayah wisata tertentu ditinjau berdasarkan aksesibilitas berupa keadaan jalan rayaketersediaan moda angkutan guna menuji daerah wisata tersebut. Peningkatan aksesibilitas artinya mempersingkat waktu beserta biaya perjalanan.<sup>35</sup>

## 3) Kurangnya wahana wisata yang menarik

Wahana wisata adalah sarana atau alat yang digunakan untuk memberikan pengalaman bermain atau hiburan pada pengunjung. Wahana wisata dapat berupa wahana permainan misalnya balap air beserta *roller coaster*, atau objek wisata alam seperti pantai dan gunung. Fungsi wahana wisata bagi pengunjung antara lain untuk mendapatkan hiburan, untuk sarana pendidikan akan budaya beserta daerah sekitar, memberi suasana berbeda di tengah kota, sarana berkegoatan yang bermanfaat dan menarik, memulihkan kesehatan rohani serta jasmani, dan tempat melakukan interaksi. Sedangkan fungsi bagi pengelola antara lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, membantu melestarikan budaya, dan membantu mengembangkan daerah sekitar.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam partisipasi juga terdapat faktor-faktor yang mampu mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, munculnya partisipasi masyarakat adalah salah satu aktivitas masyarakat guna melaksanakan suatu tindakan,

---

<sup>34</sup>Anggina, Lise Asnur, "Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Puncak Tonang Kabupaten Pasaman" *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6 No. 2 (2022):212, diakses pada 23 Januari, 2024, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/50704>.

<sup>35</sup>Yosef Abdul Ghani, "Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat", *Jurnal Pariwisata* IV No. 1 April (2017): 25.

<sup>36</sup>Mani Imelda Blegur, dkk, "Faktor Penyebab Menurunnya Wisatawan Berkunjung Ke Objek Wisata Kadelang Fatang" *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 1 No. 3 Agustus (2023): 287, diakses pada 23 Januari, 2024, <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/jkpu/article/download/463/445/1569>.

terdapat faktor pendukung partisipasi masyarakat di antaranya.

1) Daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah kata lain dari objek wisata tetapi selaras dengan peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009. Kata objek wisata telah tidak relevan lagi dalam menyebutkan daerah tujuan wisatawan tertentu maka dipergunakan kata “Daya Tarik Wisata”. Daya tarik wisata bisa didefinisikan dengan, ada beberapa yang memiliki pendapat daya tarik wisata merupakan semua hal yang ada di tempat tertentu mempunyai keindahan, keunikan, nilai, kemudahan yang memiliki wujud keanekaragaman kekayaan alam dan buatan manusia yang menarik maupun memiliki nilai guna dilihat dan dikunjungi wisatawan.<sup>37</sup>

2) Aspek masyarakat

Aspek masyarakat memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata, termasuk aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai motivasi utama untuk mengembangkan desa wisata, dikarenakan masyarakat mendukung pengembangan tersebut untuk diberdayakan dan merasakan manfaat positif darinya.<sup>38</sup>

3) Infrastruktur

Infrastruktur wisata adalah sistem fasilitas umum yang memberikan layanan yang krusial untuk menunjang pengembangan di destinasi wisata mencakup infrastruktur sosial, lingkungan dan ekonomi. Infrastruktur ini sangat krusial untuk mendorong mutu wisatawan tersebut sendiri dan di lingkungan sekitar. Infrastruktur pariwisata mencakup prasarana dasar yang

---

<sup>37</sup>Muhammad Nur Mialfi Salim, dkk, “Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Minat Berkunjung Pada Wisata Hutan Mangrove Kaliwlingi Brebes” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2 No. 4 Oktober (2022): 115, diakses pada 23 Januari, 2024, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/download/156/170>.

<sup>38</sup>Muchammad Satrio Wibowo dan Lutfi Arviana Belia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan” *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 6 (2023): 26, diakses pada 23 Januari, 2024, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/58108>.

dibuat guna melayani aktivitas jasa kepariwisataan, baik di wilayah destinasi wisata dan di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur wisata dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan lokal ataupun mancanegara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>39</sup>

f. Partisipasi Masyarakat dalam Islam

Partisipasi masyarakat menurut pandangan Islam melibatkan keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk partisipasi politik. Dalam Islam, partisipasi politik dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>40</sup>

Dalam perspektif Al-Qur'an, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam kehidupan sosial dianggap penting. Islam mengajarkan solidaritas, keadilan sosial, dan mendorong umat Islam untuk mempraktekannya dalam kehidupan.<sup>41</sup> Dalam konteks sejarah, partisipasi masyarakat pada masa awal Islam juga dapat dilihat dari proses pemilihan pemimpin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib, yang menunjukkan beragam cara partisipasi masyarakat dalam proses politik pada masa itu.

Partisipasi masyarakat dalam konteks Islam dipengaruhi oleh faktor agama, keluarga atau golongan, kewajiban sebagai warga negara, dan kesadaran politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pandangan Islam dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan faktor-faktor sosial lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Runik Sri Astuti, "Memacu Infrastruktur Wisata" *Kompas.id*, diakses pada tanggal 23 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/16/memacu-infrastruktur-wisata-mendulang-cuan-devisa-feature>

<sup>40</sup>Hairul Rizal, "Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Pilpres 2014", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015): 32

<sup>41</sup>Ulfi Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah* 39 No. 1 (2019): 32-44, diakses pada 02 November, 2023, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/download/3989/2170>.

<sup>42</sup>Hairul Rizal, "Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Pilpres 2014", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 3 No. 2 (2017), diakses pada 02 November, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1266/1094>.

AL-Quran telah menganjurkan kita dalam bermasyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau saling menolong karena pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial. Seperti firman Allah dalam (Q.S Al maidah 5 ayat: 2)

...وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا قُلِي وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>٤٣</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلِي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صَلِي وَتَقُوا اللَّهَ قُلِي إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."<sup>43</sup>

Ayat tersebut sangat jelas diperintahkan guna saling bekerja sama, dikarenakan jika diantara manusia pada masyarakat tertentu mempunyai semangat kerja sama yang tinggi, dengan demikian hal tersebut sebagai modal besar untuk kemajuan spiritual dan materi masyarakat dikarenakan saling tolong menolong dan kerja sama merupakan sarana tepat bagi perkembangan dan kemajuan seluruh segi masyarakat.

#### g. Pengertian Strategi

Strategi berdasarkan bahasa Yunani Kuno artinya seni berperang. Sesuai pemaparan Candler dalam Rangkuti, strategi merupakan alat guna mewujudkan tujuan jangka panjang yang mana program tidak berjalan dan mementingkan lokasi sumber daya.<sup>44</sup> Sesuai pemaparan Proter strategi adalah alat yang sangatlah krusial guna mewujudkan keunggulan bersaing. Stephanie K. Marrus, mengartikan Strategi dalam Husaini Usman merupakan proses melakukan penentuan rencana pemimpin yang fokusnya kepada tujuan jangka organisasi, dan menciptakan cara tertentu dalam mewujudkan tujuan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Al-Mubarak, al-Maidah ayat 2, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al Mubarak), 106

<sup>44</sup>Rangkuti Freddy, *Teknik Membedakan Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 3

<sup>45</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 334

Sesuai pemaparan Henry Mintzberg dalam Solihin bahwa strategi dibedakan ke dalam lima pengertian: strategi pola, perencanaan, taktis, prespektif maupun strategi lokasi.<sup>46</sup> William F Glueck dari Amirallah, mengartikan strategi merupakan rencana integrasi yang terpadu maupun luas yang mengkoneksikan manfaat strategi perusahaan dengan tatangan lingkungan yang dibuat dalam memastikan sasaran utama yakni bisa mencapainya dengan pelaksanaan yang tepat.

William J. Station dalam Amirallah bahwa strategi merupakan rencana dasar yang luas melalui kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan.<sup>47</sup> Strategi secara etimologis merupakan keterampilan ataupun cara merencanakan dan mengorganisasikan. Secara terminologi definisi strategi merupakan ilmu mengarahkan ataupun merencanakan suatu hal. Tetapi definisi strategi bukan hanya sempit seperti itu, namun sejumlah ahli mendefinisikan strategi secara umumnya yaitu.

Strategi secara umum merupakan proses rencana pemimpin yang mempunyai fokus tujuan jangka panjang organisasi, mencakup susunan metode ataupun upaya guna mewujudkan tujuan dengan maksimal. Sedangkan, strategi secara khusus merupakan tindakan yang terus menerus mengalami peningkatan. Hakikatnya strategi adalah pengolahan maupun perencanaan dalam mewujudkan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan, strategi tidak berfungsi menjadi peta jalan yang hanya menunjukkan arah tujuan tertentu, namun strategi harus membuktikan bagaimanakah taktik operasional.<sup>48</sup>

Strategi Berdasarkan penguraian Frened R David, diartikan dengan alat guna mewujudkan tujuan jangka panjang untuk melaksanakan tindakan potensial yang memerlukan kepuasan bisnis tingkat atas maupun sebagian besar sumber daya perusahaan. Strategi mempunyai konsekuensi sangat multidimensi juga multifungsi untuk melakukan

---

<sup>46</sup>Ismail Sholihin, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 25-28

<sup>47</sup>Amrillah, "*Manajemen Strategi Teori-Teori Kinerja*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4

<sup>48</sup>Effendy, Onong Uchjana, Ilmu, *Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1933), 7



pertimbangan pada beberapa faktor internal dan eksternal yang dihadapinya.<sup>49</sup>

Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pengertian di atas, strategi adalah perencanaan pola umum yang dimulai dengan mengimplementasikan dan beberapa langkah dalam mewujudkan tujuan tertentu. Pada dasarnya tidak tindakan dalam memunculkan tujuan tertentu bisa dipisahkan dari strateginya. Maka seluruh rencana aktivitas bisa terwujud secara baik. Tentu hal tersebut harus dilaksanakan selaras dengan strategi yang sudah dibuat secara baik.

#### h. Komponen Strategi

Berdasarkan pengembangan pariwisata haruslah memiliki beberapa komponen dalam menarik wisatawan untuk berkunjung. Sesuai pemaparan Gilberth, Wanhill, Cooper, Fletcher, beserta Steperd dalam Sunaryo ada empat komponen yang harus dimiliki diantaranya:

##### 1) Strategi pengembangan atraksi (*attraction*)

Atraksi merupakan faktor yang bisa memberikan pengaruh pada daya tarik. Atraksi dikenal pula sebagai daya tarik maupun objek wisata yang diminati wisatawan. Daerah tertentu ataupun bisa menjadi daerah tujuan wisata bila situasinya memungkinkan guna mengalami perkembangan menjadi daya tarik wisata sebagian.

Hal yang ditonjolkan pada aspek ini salah satunya yaitu melakukan pengembangan atraksi wisata yang mempunyai potensi unggul, kemudian bisa menarik minat pengunjungnya. Pengembangan pariwisata sesuai pemaparan Pitan merupakan aktivitas yang bertujuan dalam melakukan pengembangan daerah ataupun tempat yang harus dilakukan pengelolaan secara baik, menciptakan dan memelihara karya baru. Maka pengembangan pariwisata adalah langkah dalam mencapai keterpaduan dalam pendayagunaan sumber daya pariwisata maupun keterpaduan semua bentuk kepariwisataan, secara langsung berkaitan dengan kelangsungan pengembangan pariwisata.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Fred R David, *Manajemen Strategi : Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat edisi 12, 2010)

<sup>50</sup>I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, “Sosiologi Pariwisata” (Yogyakarta: Andi, 2005), 56.

2) Strategi pengembangan fasilitas (*amenity*)

Gilberth, Fletcher, Steperd Cooper, dan Wanhill dalam Sunaryo menyebutkan, pengembangan fasilitas ataupun akomodasi adalah sarana prasana yang diperlukan wisatawan pada saat ada di lokasi tujuan wisata. Umumnya, amenitas merupakan seluruh fasilitas dan prasana yang diperlukan wisatawan pada saat tinggal di wilayah tujuan wisata. Sarana prasana mencakup: rumah makan, penginapan, agen perjalanan serta transportasi.<sup>51</sup>

3) Strategi pengembangan aksesibilitas (*accessibility*)

Aksesibilitas wisata merupakan semua fasilitas yang mempermudah kedatangan wisatawan ke tujuan dan destinasi wisata. Sesuai pemaparan Steperd, Cooper, Fletcher, Wanhill, dan Gilberth, dalam Sunaryo bahwasannya pengembangan aksesibilitas adalah aktivitas krusial pada pariwisata mulai dari transportasi yang menjadi akses krusial untuk pariwisata. Akses dinamakan transferabilitas, kemudahan guna berpindah antar daerah. Bila daerah mempunyai potensi wisata, dengan demikian aksesibilitas yang memadai haruslah disediakan supaya kawasan tersebut bisa dikunjungi.<sup>52</sup>

4) Strategi pengembangan pelayanan tambahan (*ancilliary*)

Pelayanan tambahan ataupun sering disebut pelengkap yang harus diberikan pemda tujuan wisata. Jasa yang ditawarkan mencakup pembangunan fisik, pemasaran, koordinasi maupun peraturan perundang-undangan seluruh jenis aktivitas baik di jalan dan tempat wisata.<sup>53</sup> Sesuai pemaparan Gamal Suwantoro pengembangan pariwisata adalah sapta kebijakan pengembangan pariwisata, antara lain adalah promosi. Aktivitas promosi dilaksanakan dengan beberapa cara, menciptakan sistem informasi yang kreatif atau melaksanakan kerja sama yang baik dengan pusat

---

<sup>51</sup>Sunaryo Bambang, “ Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia”, 159

<sup>52</sup>Sunaryo Bambang, “ Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia”, 159.

<sup>53</sup>Sunaryo Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, 159

informasi pariwisata yang lain.<sup>54</sup> Promosi pada pemasaran produk pariwisata memiliki peran dalam mendukung transaksi lewat atraksi, pemasaran, penarikan, juga membedakan produk pariwisata yang dipromosikan dengan produk pariwisata yang lain.

Oleh karenanya, strategi pengembangan pariwisata yang dipakai mencakup empat komponen yakni amenities, atraksi, aksesibilitas, beserta pelayanan tambahan.

## 2. Pengembangan Masyarakat Islam

### a. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Zubaedi pengembangan masyarakat adalah usaha untuk melakukan pengembangan pada kondisi masyarakat dengan positif dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip saling menghormati dan keadilan sosial. Disamping itu, pengembangan masyarakat didefinisikan pula dengan komitmen untuk memberdayakan kelompok masyarakat bawah agar masyarakat mempunyai pilihan nyata mengenai masa depannya.<sup>55</sup> Sedangkan sesuai pemaparan Twelvetrees pengembangan masyarakat merupakan *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”* Memiliki arti proses membantu masyarakat dalam mengembangkan kelompok mereka sendiri dengan melaksanakan tindakan kolektif.<sup>56</sup>

Menurut Dunham mengemukakan pengembangan masyarakat adalah upaya terorganisasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui upaya swadaya dan kerja sama dari penduduk desa, namun dengan bantuan teknis melalui pemerintah atau organisasi sukarela.<sup>57</sup>

Menurut Wuradji mengemukakan pengembangan masyarakat adalah suatu proses membangun kesadaran kritis yang dilaksanakan secara partisipatif, transformatif, sistematis maupun berkelanjutan dengan mengorganisir dan membangun kapasitas untuk mengelola permasalahan

---

<sup>54</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 56

<sup>55</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 4.

<sup>56</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014): 38

<sup>57</sup>Erna, *Definisi Pengembangan Masyarakat, Pendekatan Radikal Dan Pendekatan Profesional*. Universitas Halu Oleo Kendari, 2015.

perbedaan mendasar yang mereka hadapi guna menghasilkan perubahan kondisi kehidupan yang positif selaras dengan cita-cita yang diinginkan. Maka, istilah pengembangan masyarakat pada penelitian ini mengacu pada proses penggalian dan kesadaran kemampuan masyarakat lokal yang dilaksanakan semua sektor masyarakat, tujuannya untuk memuaskan kebutuhan dan mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi.<sup>58</sup>

Karena itu, pengembangan masyarakat bisa diartikan dengan upaya membantu seseorang dan kelompok dalam masyarakat guna menyelesaikan masalah sosial dan mengambil tindakan nyata mengenai masa depan untuk memperbaiki kualitas hidup.

b. Pengembangan Masyarakat Islam

Pengembangan masyarakat Islam adalah suatu bentuk dakwah yang bertujuan meningkatkan kemampuan yang ada dalam masyarakat. Pencapaian tujuan ini dalam implementasi memerlukan dukungan teoretis yang sesuai serta perangkat operasional maupun konseptual yang bisa diterapkan. Pertama perlu diperjelas tujuan pengembangan masyarakat, faktor apa sajakah yang terdapat dalam masyarakat dan dianggap mampu mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidup, dan kedua apakah strateginya, siapa pelakunya, bagaimana hal ini dapat dicapai dan apa yang dibutuhkan untuk memfasilitasi hal itu.<sup>59</sup>

Pengembangan harus menanamkan kemandirian dalam setiap masyarakat yang dikembangkan. Masyarakat yang dikembangkan harusnya menciptakan sendiri suatu organisasi yang memandu dan mengarahkan berjalannya pengembangan. Al-Qur'an telah menganjurkan setiap makhluknya untuk melakukan suatu pengembangan. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. ar-Ra'd 13 ayat 11)

---

<sup>58</sup>Lukman, "Pengembangan Masyarakat Sebagai Konsep Dakwah", *Jurnal Bina Ummat*, STID Mohammad Natsir, Vol. 2, No. 2 (2019), diakses pada 24 November, 2023, <https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/49>.

<sup>59</sup>Hasan Bastomi, "Filosofi Gusjigang dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Kudus", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3 No. 1 (2019): 61, diakses pada 24 November, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/view/5625>.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ <sup>فَلْيَ</sup> وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
 سُوءَآءَافْلَاقٍ مَرَدَّدَهَا <sup>ج</sup> وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا مِنِّ وَّآلٍ { ١١ }

Artinya: "... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia."<sup>60</sup>

Ayat di atas menegaskan Allah tidak mengubah kondisi dan martabat setiap masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ayat tersebut mendorong pula kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pengembangan yakni menjadikan komunitas maupun masyarakat penerima program pengembangan yang bisa mengubah masyarakat atau menambah derajat serta kesejahteraan hidup masyarakat.

#### c. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip pengembangan merupakan panduan atau pedoman yang harus dipegang dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Di bawah adalah pemaparan terkait prinsip pengembangan masyarakat:

- 1) Prinsip kesetaraan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjangkau kesempatan maupun sumber daya yang tersedia. Program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara adil dan merata serta tidak memandang jenis kelamin, agama, suku, ataupun latar belakang.
- 2) Prinsip partisipasi, masyarakat harus diikutsertakan dengan aktif pada setiap tahap program pemberdayaan, mulai merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan keberhasilan program dan memperkuat kemandirian masyarakat.
- 3) Prinsip kemandirian dan keswadayaan, prinsip ini mengedepankan maupun menghargai potensi masyarakat dibandingkan bantuan pihak lainnya. Program pemberdayaan masyarakat harus memberdayakan masyarakat guna mandiri atau tidak bergantung kepada bantuan dari pihak lainnya.

<sup>60</sup>Al-Mubarak, ar-Ra'd, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al Mubarak),



- 4) Prinsip berkelanjutan, program pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan membangun kelembagaan yang kuat atau memperbaiki kegiatan yang dilakukan.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat harus diterapkan secara holistik dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, pendamping haruslah memiliki komitmen dalam mengarahkan juga membina masyarakat dengan jelas. Dengan menerapkan prinsip tersebut, diharapkan program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kemandirian mereka.<sup>61</sup>

d. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pembangunan masyarakat mempunyai fungsi yang strategis, selain mampu meningkatkan kesadaran, juga mempunyai kemampuan memperkuat kapasitas (*capacity building*) agar masyarakat berdaya untuk lepas dari jerat keterbelakangan, kemiskinan, ketidakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi pengembangan masyarakat yang strategis menurut Soharto adalah:

- 1) Memberikan layanan sosial masyarakat mulai dari layanan preventif bagi anak hingga layanan terapeutik dan perkembangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
- 2) Membantu anggota masyarakat yang mempunyai minat yang sama untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melaksanakan aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- 3) Menanggapi kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung atau tertinggal, baik melalui kemiskinan atau diskriminasi berdasarkan kelas, etnis, gender, seksualitas, usia dan disabilitas.
- 4) Tekankan pentingnya kemandirian dan partisipasi informal dalam mendukung strategi memerangi kemiskinan dan penindasan, termasuk memfasilitasi partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>61</sup>Berita Hari Ini, “Pemberdayaan Masyarakat”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://m.kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5WY9TA/2>

- 5) Meminimalkan kesenjangan pemberian layanan dan menghilangkan diskriminasi dan ketertinggalan melalui strategi pemberdayaan masyarakat.<sup>62</sup>
- e. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Menurut Ife, dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan kekuatan kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui adanya pemberdayaan. "Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah." Berdasarkan penalaran tersebut, maka pengembangan pada hakekatnya melibatkan dua kata kunci, yaitu kekuasaan dan ketimpangan.<sup>63</sup>

Tujuan pengembangan menitikberatkan pada kondisi atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial, yaitu pada orang-orang yang seperti dirinya, memiliki kekuatan atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terpenuhi secara fisik, ekonomi dan sosial. Percaya diri, kemampuan mengungkapkan keinginan, rasa gizi yang baik, partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemampuan melaksanakan tugas hidup secara mandiri.<sup>64</sup>

Tujuan dari pengembangan masyarakat bergantung pada pilihan di bidang kesejahteraan sosial yang diperlukan, seperti sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Selain itu, tujuan pengembangan masyarakat juga dapat menjamin masyarakat yang mandiri sadar potensi, kekuatan, dan kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>65</sup> Pengembangan mencakup beberapa langkah guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, langkah tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kegiatan sosialisasi dan konsultasi kepada semua masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>62</sup>Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014): 28-29

<sup>63</sup>Miftachul Huda, *pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009): 272-273.

<sup>64</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2014): 60.

<sup>65</sup>Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1 No. 1 (2016): 60-61, diakses pada 12 November, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/2575/1995>.

- b. Memberikan motivasi untuk masyarakat.
- c. Membangun kapasitas masyarakat dengan pelatihan vokasi.
- d. Mewujudkan peluang usaha mandiri guna memberikan peluang distribusi produk kepada masyarakat.<sup>66</sup>

### 3. Pengembangan Wisata

#### a. Pengertian Pengembangan Wisata

Pengembangan wisata adalah salah satu upaya untuk mengembangkan obyek wisata supaya menjadi lebih menarik baik dari segi lokasi dan objek pada daerah wisata tersebut untuk menarik wisatawan agar berkunjung.<sup>67</sup>

Menurut Deddy Prasetya Maha Rani mengemukakan pengembangan pariwisata daerah meliputi pengembangan fisik objek dan daya tarik wisata. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, perlu diambil langkah-langkah bersama organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pemangku kepentingan yang akan mendukung pengembangan pariwisata daerah lebih lanjut.<sup>68</sup>

Menurut I Made Darma Oka mengemukakan pengembangan wisata sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi pariwisata harus dilakukan dengan menjaga jati diri bangsa dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata bertujuan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor inti yang mampu merangsang kegiatan-kegiatan pada sektor lain yang terkait. Sehingga penyerapan tenaga kerja, opini masyarakat, pendapatan daerah dan nasional serta perolehan devisa meningkat.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 7 No. 3 (2018): 300, diakses pada 12 November, 2023, <https://eprints.uny.ac.id/56362/>.

<sup>67</sup>Mario Barreto, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo Kabupaten Bobonaro, Timur Leste", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Udayana, Vol. 4, No. 11 (2015)

<sup>68</sup>Deddy Prasetya Maha Rani, "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi kasus: Pantai Lombang)", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3 (2014): 414, diakses pada 12 November, 2023, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ijpm5b020ff16full.pdf>.

<sup>69</sup>I Made Darma Oka, "Potensi Pengembangan Pariwisata Minat Khusus di Desa Pejaten, Tabanan", *Jurnal Analisa Pariwisata*, Vol. 10 No. 1 (2010): 25, diakses pada 12 November, 2023, <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/download/2576/1797/9009>.

Pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan biasanya mengunjungi tempat-tempat tertentu yang menarik, seperti tempat bersejarah, keindahan alam, atau tempat-tempat yang menawarkan hiburan dan rekreasi.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi pariwisata atau daerah tujuan wisata agar menjadi lebih baik dan menarik dari segi lokasi dan fasilitas pendukungnya sehingga menarik wisatawan untuk datang.

b. Prinsip-prinsip Pengembangan Wisata

Prinsip pengembangan wisata adalah seperangkat pedoman yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat serta lingkungan alam. Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan wisata yang dapat ditemukan dari hasil pencarian:

1) Prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan harus berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.<sup>71</sup>

2) Prinsip keterlibatan masyarakat

Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata. Sikap dan nilai tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.

3) Prinsip keaslian

Atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut.

---

<sup>70</sup> Merdeka.com, “Pengertian Wisata”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-wisata-jenis-dan-manfaatnya-bagi-manusia-kln.html>

<sup>71</sup> Prezi, “Prinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata di Indonesia”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://prezi.com/p/3xiuq4cr76a/prinsip-prinsip-pengembangan-pariwisata-di-indonesia/>

## 4) Prinsip konservasi dan daya dukung

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan konservasi dan daya dukung yang tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.<sup>72</sup>

## 5) Prinsip aksesibilitas

Sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan.

## 6) Prinsip amenitas

Fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.<sup>73</sup>

## 7) Prinsip something to see, something to do, something to buy

Dalam pengembangan suatu objek wisata setidaknya harus diperhatikan tiga prinsip berikut: ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh pengunjung selain melihat objek wisata utama, ada sesuatu yang dapat dibeli di sekitar objek tersebut baik itu berupa souvenir, makanan, minuman atau jasa seperti penginapan.<sup>74</sup>

## c. Fungsi Pengembangan Wisata

Pengembangan wisata memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

## 1) Meningkatkan perekonomian

Pengembangan wisata dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan penerimaan devisa dari sektor pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja pariwisata.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> MetroNTB, “Prinsip Pengembangan”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://www.metrontb.com/pariwisata/8188716211/prinsip-pengembangan-produk-yang-wajib-diketahui-desa-wisata>

<sup>73</sup> JatengProv, “Kembangkan Wisata dengan Prinsip”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kembangkan-wisata-dengan-prinsip-3a/>

<sup>74</sup> Geograph88, “Prinsip Pengembangan Pariwisata”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://geograph88.blogspot.com/2014/06/prinsip-pengembangan-pariwisata.html?m=1>

<sup>75</sup> Sumber Ekon, “Pembangunan Kepariwisataaan”, diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan->



- 2) Mempromosikan kebudayaan  
Pengembangan wisata juga dapat mempromosikan kebudayaan daerah melalui pengembangan obyek wisata yang berbasis kearifan lokal.<sup>76</sup>
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
Pengembangan wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan.
- 4) Mempelihara lingkungan  
Pengembangan wisata juga harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak lingkungan sekitar obyek wisata.<sup>77</sup>  
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan wisata antara lain:
  - 1) Sosialisasi: Melakukan sosialisasi pentingnya revitalisasi pariwisata berbasis kearifan lokal di daerah tersebut.
  - 2) Menggali potensi wisata: Menggali potensi wisata di tempat obyek wisata yang punya peluang besar dikembangkan.
  - 3) Penataan obyek wisata: Bersama pengelola obyek wisata, masyarakat atau pokdarwis melakukan penataan obyek wisata, atraksi wisata, promosi wisata dan mengembangkan kemitraan dengan pihak lain.
  - 4) Kemitraan: Melakukan kemitraan dengan pihak swasta/agen/travel dalam pengelolaan pariwisata.
  - 5) Monitoring dan evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan wisata yang telah dilakukan.
  - 6) Pengembangan desa wisata: Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan

---

[kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi](#)

<sup>76</sup> Kulonprogokab, "Pengembangan Pariwisata dan Peran Kelompok Kegiatan Program KKBPK", diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detail/6849/pengembangan-pariwisata-dan-peran-kelompok-kegiatan-program-kkbpk>

<sup>77</sup> Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosia*, e-ISSN:2620-3367, Vol. 1 No. 3 Desember (2018):155-165, diakses pada 12 November, 2023, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20490>.

pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>78</sup>

- 7) Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat: Pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.<sup>79</sup>

d. Pengembangan Wisata dalam Islam

Pengembangan wisata menurut pandangan Islam, pariwisata dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang memiliki nilai positif jika dilakukan dengan tujuan yang baik. Beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata antara lain adalah:

- 1) Perjalanan sebagai Ibadah: Perjalanan dianggap sebagai ibadah karena diperintahkan untuk melakukan kewajiban dari rukun Islam, seperti haji dan umrah.
- 2) Hubungan dengan Konsep Pengetahuan dan Pembelajaran: Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan.
- 3) Tujuan Wisata dalam Islam: Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya.
- 4) Tujuan Besar Lainnya: Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan Allah dan Rasul-Nya.<sup>80</sup>

Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata, pandangan Islam adalah positif jika pengelolaan pariwisata membawa manfaat. Namun jika sebaliknya, pandangan Islam

---

<sup>78</sup> Kulonprogokab, "Pengembangan Pariwisata dan Peran Kelompok Kegiatan Program KKBPK", diakses pada tanggal 12 November 2023, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/6849/pengembangan-pariwisata-dan-peran-kelompok-kegiatan-program-kkbpk>

<sup>79</sup> Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosia*, e-ISSN:2620-3367, Vol. 1 No. 3 Desember (2018):155-165.

<sup>80</sup> Lailatul Azizah, "Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Islam Menggunakan Metode Analisis SWOT Halal Tourism (Studi Pada Destinasi Bromo Tengger Tosari Pasuruan)", *Jurnal MANOVA IV* No. 2 (2021), diakses pada 12 November, 2023, <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MANOVA/article/download/414/308/1723>

tetap memberikan resistensi terhadap jenis wisata yang merusak kehidupan beragama.

Dengan demikian, pandangan Islam terhadap pengembangan wisata menekankan pada nilai-nilai positif, pengetahuan, pembelajaran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam menjalankan kegiatan pariwisata.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga digunakan sebagai referensi serta perbandingan guna mendapatkan ide-ide dari peneliti baru. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, penelitian dari Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni yang berjudul “*Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*”. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature, wawancara, dan observasi non partisipan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang peranan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata yang belum tercapai. Masyarakat masih menjadi objek pembangunan dan belum menjadi subyek pembangunan. Selain itu, dibutuhkan juga peranan pemerintah. Untuk menjamin hal itu diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengembangan desa wisata dan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>81</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang. Sudut pandang penelitian ini terdapat pada pemerintah desa dan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada pengelola wisata dan masyarakat Desa Karasgede Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

---

<sup>81</sup>Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”, *Jurnal Kawistara* 3No. 2, Agustus (2013): 129, diakses pada 24 November, 2023, <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/3976>.

*Kedua*, penelitian dari Edison Stevanus Frasawi dan I Putu Ananda Citra yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Ambengan dan mendeskripsikan kendala dalam pengembangan Desa Wisata Ambengan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, pencatatan, dokumen, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Ambengan masih rendah yaitu sebesar 90% berada pada kategori rendah dan kendala dalam pengembangan Desa Wisata Ambengan yaitu aksesibilitas, sarana dan prasarana, akomodasi, promosi, dan sumber daya manusia.<sup>82</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Sedangkan perbedaan terletak pada obyek wisatanya, di penelitian tersebut obyek wisata terdapat pada wisata air terjun dan penelitian ini terdapat pada wisata taman dan pasar tradisional.

*Ketiga*, penelitian dari Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid, dan Arik Prasetya (2016) dengan judul “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata meliputi partisipasi konseptual, partisipasi fisik, partisipasi keterampilan dan kemampuan, serta partisipasi kepemilikan. Selain itu, juga terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Edison Stevanus Frasawi, I Putu Ananda Citra, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada”, *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 6 No. 3 November (2018): 11, diakses pada 24 November, 2023, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/20704/12699>.

<sup>83</sup>Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid, Arik Prasetya, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 33 No.2 April (2016): 18.

Dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yaitu partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Terdapat juga perbedaannya yaitu sudut pandangnya, penelitian tersebut sudut pandang terletak pada pemerintah desa, sedangkan penelitian ini sudut pandangnya terdapat pada pengelola wisata dan masyarakat.

*Keempat*, penelitian dari Maya Sajidah Salsabila dan Agus Machfud Fauzi dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan suatu wisatadesa di Desa Menang yang akhirnya menjadi salah satu sumber perekonomian perbaikan bagi masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan, tenaga, dan kreativitas. Hal ini dilakukan oleh masyarakat untuk bahu membahu mengembangkan desa wisata belimbing dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.<sup>84</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Sedangkan perbedaan terletak pada obyek wisatanya, di penelitian tersebut obyek wisata terdapat pada Pentilasan Sri Aji Jaya Baya dan penelitian ini terdapat pada wisata taman dan pasar tradisional.

*Kelima*, penelitian Eko Murdiyanto dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di desa dengan pemahaman karakteristik serta tatanan sosial budaya masyarakat. Selain itu juga untuk menemukan dan mengenali tingkat kesadaran masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam atraksi dan paket wisata. Keterlibatan

---

<sup>84</sup>Maya Sajidah Salsabila, Agus Machfud Fauzi, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Pariwisata Terapan* 5 No. 1 (2021): 12, diakses pada 24 November, 2023, <https://jurnal.ugm.ac.id/jpt/article/view/665505>.



seluruh warga diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat.<sup>85</sup>

Dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yaitu partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Terdapat juga perbedaannya yaitu sudut pandangnya, penelitian tersebut sudut pandang terletak pada karang taruna, sedangkan penelitian ini sudut pandangnya terdapat pada pengelola wisata dan masyarakat.

### C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata terdiri dari masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan diantaranya partisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti masyarakat dilibatkan dalam aspek baik gagasan, saran, dan pemikiran. Kedua, ikut serta dalam implementasi, termasuk penyediaan sumber daya manusia dan pendanaan pembangunan. Ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, yang mencakup partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Dan terakhir yaitu partisipasi dengan memanfaatkan hasil pembangunan, yang mengandung makna diantaranya bahwa hasil dari pembangunan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kemudian terdapat empat komponen dalam strategi partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata yaitu *attraction* (atraksi), *amenity* (fasilitas), *accessibility* (aksesibilitas), dan *ancillary* (pelayanan tambahan). Selain itu, juga menjelaskan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Kemudian menghasilkan wisata berkembang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, serta wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati keindahan alam.

Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut.

---

<sup>85</sup>Eko Murdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman", ISSN: 1829-9946, *Jurnal Sepa* 7 No.2, Februari (2011): 100, diakses pada 24 November, 2023, <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/download/48893/30160>.

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

